

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2017 *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 / PMK.03/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2016 Tentang Pengampunan Pajak.*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008 *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.*
- Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah.* Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kurniawan, Panca Dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak Di Indonesia, Edisi Pertama.* Malang: Banyumedia Publishing.
- Muljono, D. 2006. *Akuntansi Pajak.* Yogyakarta: Andi
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari. N. N. (2016). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt Z)*
- Presiden Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*

Presiden Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan*

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat